BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian global sejauh ini masih cenderung melemah, hal tersebut berdampak langsung pula pada kondisi perekonomian Indonesia serta khususnya perekonomian Kabupaten Karanganyar, kondisi pelemahan tersebut diperkirakan masih akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun depan.

Terkait hal tersebut rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkualitas serta mengantisipasi berbagai dampak persaingan MEA, maka kebijakan perekonomian Kabupaten Karanganyar ke depan antara lain diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan iptek, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, kinerja perekonomian Kabupaten Karanganyar akan didukung pula antara lain melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu untuk dicermati adalah terkait kebijakankebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh dan berimbas langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten Karanganyar, sehingga diperlukan upaya sinergitas untuk memadukan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sekitarnya.

3.1.1. Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional

Moderasi perekonomian global memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi domestik menunjukan tren perlambatan sebagai konsekuensi dari pelemahan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas global. Dalam kurun tahun 2012-2015, belanja investasi Pemerintah untuk infrastruktur dan program-program peningkatan kesejahteraan didorong sebagai penopang kinerja perekonomian dalam negeri.

Sektor konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, laju inflasi relatif semakin terkendali, sejalan dengan

penurunan harga komoditas dan terjaganya pasokan bahan pokok kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perekonomian global juga memengaruhi tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Terlepas dari kondisi tersebut, berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukan perbaikan, terutama ditunjukan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan gini ratio serta pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami peningkatan.

Selama periode 2011-2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukan perlambatan. Pertumbuhan pada tahun 2011 mencapai sebesar 6,50 persen namun terus melambat hingga 4,88 persen pada tahun 2015. Perlambatan kinerja perekonomian domestik disebabkan oleh penurunan kinerja perdagangan akibat pelemahan permintaan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Selain itu, proses pemulihan ekonomi negara maju pasca krisis 2008 juga memicu ketidakpastian kebijakan di sektor keuangan. Perekonomian nasional pada tahun 2016, berhasil tumbuh 5,02%, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang tumbuh 4,88%, seperti terlihat pada Gambar 3.1

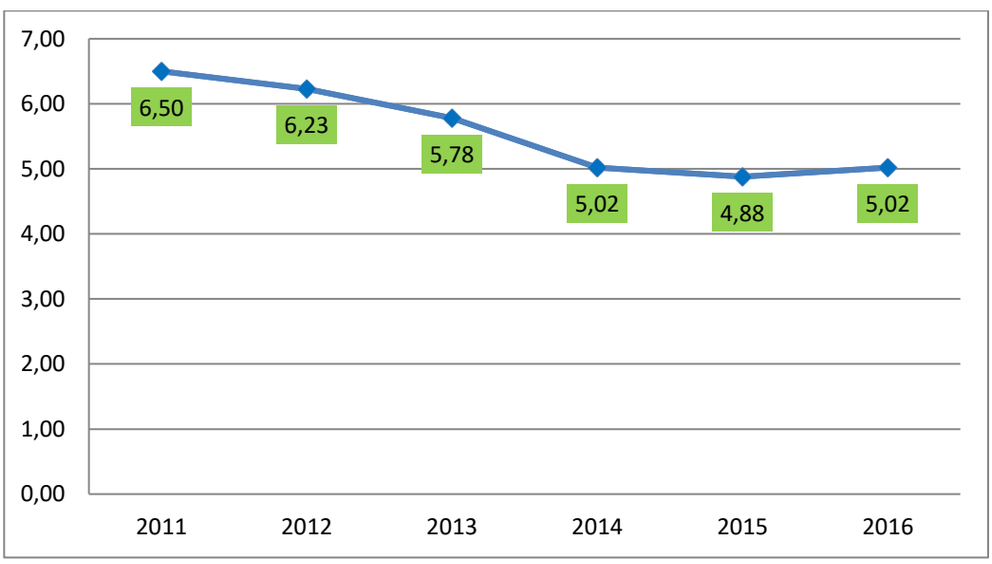

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2016

Lebih tingginya pertumbuhan ekonomi 2016 tersebut didorong oleh akselerasi Jawa dan Sumatera; sementara Kawasan Timur Indonesia masih tumbuh melambat. Perekonomian Jawa turun dari 5,47% menjadi 5,28%; sementara Sumatera tumbuh dari 3,53% menjadi 4,29%. Pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera terutama karena dukungan konsumsi rumah

tangga dan ekspor. Dari sisi sektoral, perbaikan ekonomi di Jawa didorong oleh lapangan usaha perdagangan dan jasa-jasa. Sementara, di Sumatera didukung oleh akselerasi perdagangan dan konstruksi, serta kontraksi yang lebih rendah di sektor pertambangan.

Di sisi lain, pada tahun 2016 terjadi penurunan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi, menahan pertumbuhan lebih lanjut di seluruh wilayah. Di Kawasan Timur Indonesia, perlambatan konsumsi pemerintah dan investasi membuat Kawasan Timur Indonesia tumbuh lebih rendah dibanding tahun 2015. Perlambatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia terutama terjadi di wilayah Bali Nusra dan Sulampua, seiring penurunan kinerja pada lapangan usaha konstruksi, pertambangan, dan industri pengolahan. Meski demikian, ekspor luar negeri Kawasan Timur Indonesia yang meningkat signifikan dibanding tahun 2015, khususnya terkait ekspor batubara Kalimantan, mampu menahan perlambatan ekonomi menjadi lebih dalam.

Kinerja ekspor didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batubara dan CPO, yang meningkat sejak pertengahan kedua tahun 2016. Meski masih mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen, tetapi penurunan ekspor tidak sedalam tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen.

Perlambatan pertumbuhan terjadi pada investasi, sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016. Perlambatan pada investasi dan konsumsi pemerintah salah satunya disebabkan oleh terjadinya penghematan anggaran di pertengahan tahun 2016. Sebagai akibatnya realisasi belanja modal hanya mencapai 80,6 persen dari APBN-P, sementara realisasi belanja pegawai dan barang mencapai 89,1 dan 85,3 persen. Perlambatan investasi juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai titik terendah sejak 2009. Over-capacity yang terjadi di perusahaan dan meningkatnya risiko seiring dengan kenaikan NPL menjadi salah satu penyebab perlambatan investasi.

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2015-2017 (%)

No.	Uraian	2015	2016	2017*
1.	Pertumbuhan PDB	4,8	5,0	5,1-5,3
2.	Konsumsi Rumah Tangga	5,0	5,0	5,1-5,3
3.	Konsumsi LPNRT	(0,6)	6,6	7,6-7,7
4.	Konsumsi Pemerintah	5,3	(0,1)	4,0-6,4
5.	Investasi (PMTB)	5,0	4,5	5,4-5,7
6.	Ekspor Barang dan Jasa	(2,1)	(1,7)	1,1-2,7
7.	Impor Barang dan Jasa	(6,4)	(2,3)	1,3-3,3

Sumber : BPS

**Outlook (Perhitungan Bappenas)*

Tabel 3.2. Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2015-2017 (%)

No	Uraian	2015	2016	2017*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,0	2,7	3,4-3,7
2.	Pertambangan dan Penggalian	(5,1)	0,0	1,2-1,4
3.	Industri Pengolahan	4,2	4,6	4,6-4,9
4.	Pengadaan Listrik dan Gass dan Air Bersih	1,2	5,6	4,8-5,3
5.	Pengadaan Air	7,2	4,8	4,3-4,6
6.	Konstruksi	6,6	6,9	7,1-7,4
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,5	3,8	4,9-5,3
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,7	8,0	8,0-8,4
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,4	4,9	5,1-5,3
10.	Informasi dan Komunikasi	10,1	9,0	9,9-10,3
11.	Jasa Keuangan	8,5	9,9	10,0-10,4
12.	Real Estate	4,8	4,1	5,0-5,2
13.	Jasa Perusahaan	7,7	7,4	7,4-7,5
14.	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,7	4,1	4,1
15.	Jasa Pendidikan	7,4	3,9	4,0-4,2
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,1	6,2	5,2-5,4
17.	Jasa Lainnya	8,1	7,8	7,8-8,0

Sumber : BPS
**Outlook (Perhitungan Bappenas)*

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan jasa keuangan dan asuransi adalah beberapa sektor yang mampu tumbuh lebih baik di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh positif di tahun 2016, didorong oleh kenaikan harga komoditas batu bara dan logam di pasar internasional. Perlambatan terjadi pada dua sektor penyumbang PDB terbesar, yakni pertanian dan industri pengolahan, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,2 dan 4,3 persen, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 3,8 dan 4,4 persen. Faktor cuaca menjadi penyebab turunnya pertumbuhan di sektor pertanian, sementara turunnya permintaan menjadi penyebab turunnya kinerja sektor industri pengolahan.

Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi, pada kisaran 5,1 – 5,3 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Peningkatan kualitas belanja pemerintah akan dilakukan, seiring dengan terbatasnya ruang fiskal, di antaranya melalui penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran: distribusi tertutup gas elpiji 3 kg dan pengurangan subsidi listrik 900VA; peningkatan belanja modal yang lebih produktif, dan efektivitas transfer ke daerah dan dana desa. Investasi diperkirakan akan tumbuh didorong oleh investasi langsung sebagai dampak relaksasi DNI dan perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pencapaian dalam EoDB. Ekspor diperkirakan kembali tumbuh positif, dibantu oleh kenaikan harga komoditas, tetapi relatif terbatas karena peningkatan permintaan dunia yang diperkirakan masih moderat. Impor akan meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan barang modal serta penolong untuk investasi di dalam negeri.

Dari sisi produksi, langkah pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan iklim investasi, dan membentuk kawasan industri diperkirakan akan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan di tahun 2017. Kenaikan harga komoditas, terutama batu bara dan logam, serta kebijakan pemerintah merelaksasi ekspor mineral mentah akan membantu meningkatkan kinerja sektor pertambangan penggalian. Sementara itu, faktor cuaca yang lebih mendukung dan kebijakan reformasi subsidi pupuk dan benih, diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian.

Dinamika perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi sangat berpengaruh pada laju inflasi selama 2011-2014. Arus distribusi yang lancar dan terjaminnya pasokan bahan pangan menjadi faktor utama terjaganya inflasi pada tahun 2011 sebesar 3,79% (yoy), meskipun terjadi gejolak pada harga komoditas energi dan pangan internasional. Pada tahun 2013 dan 2014, Pemerintah melakukan kebijakan reformasi struktural di bidang energi melalui penyesuaian besaran subsidi energi Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didorong oleh adanya kenaikan harga komoditas energi global. Akan tetapi, Pemerintah juga melakukan realokasi dana subsidi dalam rangka peningkatan daya beli dan penyediaan infrastruktur penunjang arus distribusi. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, laju inflasi masih dapat terjaga pada level single digit.

Laju inflasi yang relatif stabil dan terkendali di tahun 2015 sebesar 3,35% menjadi awal yang baik dalam pengendalian inflasi di tahun 2016. Inflasi 2016 secara agregat tercatat berada pada target inflasi nasional 4+1%. Inflasi secara nasional tercatat sebesar 3,02% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya selama 5 tahun terakhir.

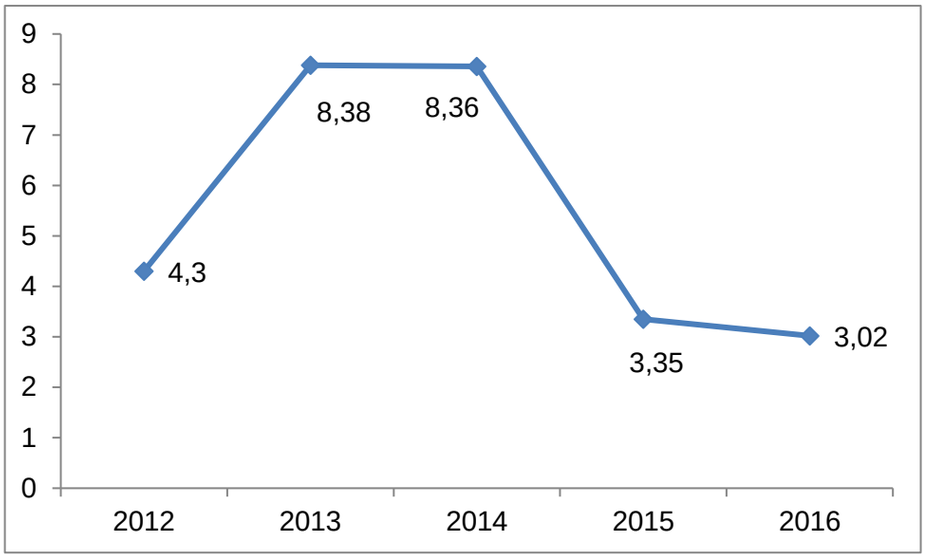

Gambar 3.2 Laju Inflasi Indonesia Tahun 2012 – 2016

Realisasi inflasi pada tahun 2016 terendah terjadi di Jawa (2,59%), diikuti KTI (2,90%), dan Sumatera (4,53%). Terjaganya inflasi 2016 dipengaruhi oleh (i) kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik nonsubsidi untuk daya 900 V, (ii) apresiasi Rupiah yang menimalisasi dampak imported inflation, (iii) tertahannya konsumsi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum tumbuh optimal, serta (iv) terjaganya harga komoditas volatile foods; terutama beras, telur ayam, dan daging ayam ras. Meski demikian, inflasi Sumatera tercatat mendekati batas atas kisaran target akibat inflasi cabai merah di berbagai daerah di Sumatera pada paruh kedua 2016. Secara keseluruhan, terkendalinya inflasi di berbagai daerah tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, konsisten dalam mengelola bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengelola permintaan, serta mengarahkan ekspektasi inflasi inti. Selain itu, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah juga turut mendorong kelancaran distribusi antar daerah.

Berbagai kebijakan pemerintah yang dilakukan berhasil menjaga stabilitas harga volatile foods diantaranya melalui peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan nasional (terutama beras), pengendalian impor bahan makanan strategis, optimalisasi Tol laut dan Gerai Maritim,

pemberantasan penimbunan komoditas, serta optimalisasi Bulog dalam menjaga pasokan selain beras. Disamping itu, koordinasi yang terus menguat pada Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai kebijakan innovatifnya telah berhasil menjaga ketersediaan pasokan pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang intensif untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Permasalahan informasi asimetris terkait data/informasi harga antara produsen, pedagang dan konsumen yang mendorong terjadinya ekspektasi inflasi juga akan dapat ditekan dengan telah tersedianya sistem Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di masyarakat, yang dapat diakses baik melalui website maupun aplikasi mobile phone.

3.1.2. Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah

Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dalam kurun waktu 2012 – 2016. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang konstan pada kisaran angka 5 – 5,5%, secara berturut-turut diangka 5,34%, 5,14%, 5,42%, dan 5,44%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,06% (TW III). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.3.

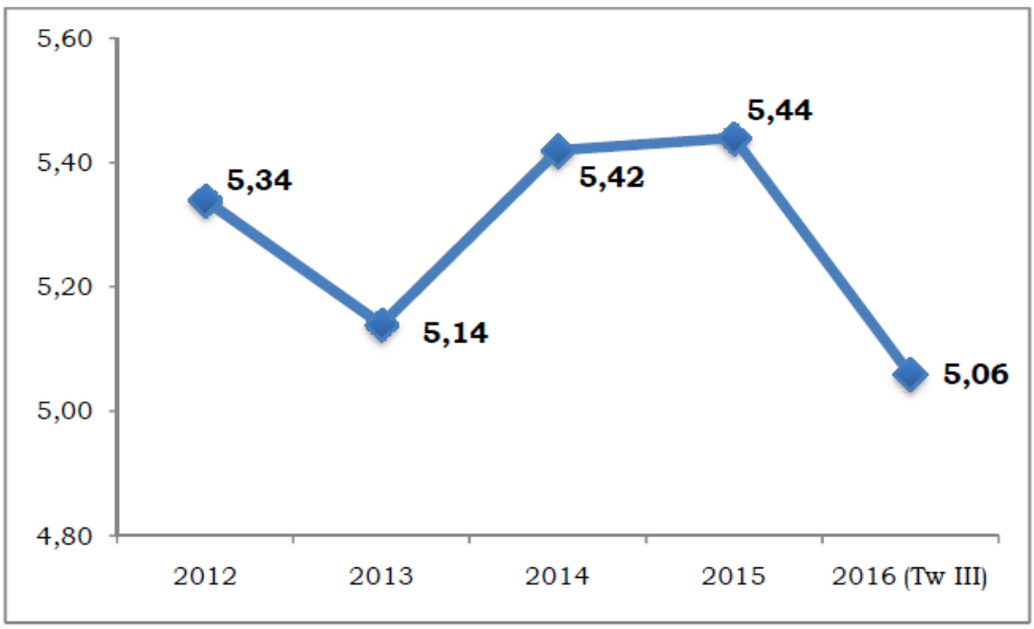

Sumber : RKPD Prov Jateng 2018

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016

Perekonomian Jawa Tengah Triwulan I-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 283.570,69 miliar, sedangkan harga konstan mencapai Rp 216.707,28 miliar. Ekonomi Jawa Tengah triwulan I-2017secara year-on-year tumbuh 5,20 persen, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,08 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (9,42%), dengan andil tertinggi disumbang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolah an (1,44). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 20,77 persen.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor yang tumbuh 6,92 persen, adapun andil tertinggi berasal dari pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (2,77 persen). Ekonomi Jawa Tengah triwulan I – 2017 secara quarter-to-quarter tumbuh sebesar 1,79 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran didorong oleh peningkatan komponen Ekspor yang tumbuh 6,87 persen. Lapangan Usaha dan Komponen tersebut juga memberi andil terbesar pada pertumbuhan q to q dengan andil masing-masing sebesar 2,42 persen dan 2,29 persen.

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I -2017 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan 34,95 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,68 persen serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,63 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Rumah Tangga 61,57 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto 29,88 persen dan Konsumsi Pemerintah 5,00 persen.

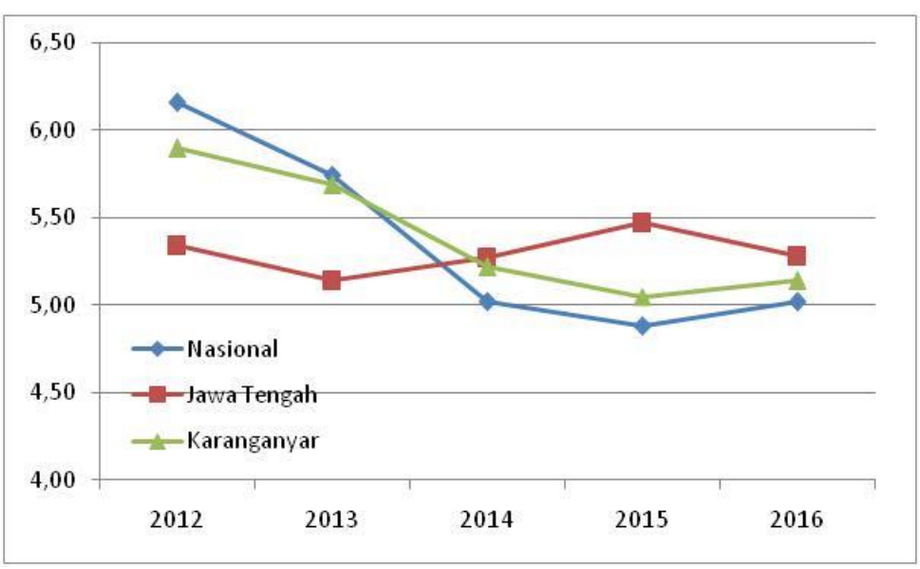

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan Kab. Karanganyar Tahun 2012 – 2016

Perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu 2014–2017, dapat diketahui bahwa sektor dengan kontribusi terbesar adalah pada sektor industri pengolahan. Selama periode tahun tersebut, semua sektor ini mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan secara berimbang. Perkembangan nilai dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017***)
1	PDRB :				
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	922,471	1.011,851*)	1.092,031**)	1.241,572
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	764,959	806,775*)	849,383**)	896,881
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	5,47	5,28	5,5 – 5,9
3.	Inflasi (%)	8,22	2,73	2,36	4,5 ± 1
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	27,52	29,96	32,10	26,06
5.	Nilai realisasi investasi (Trilyun Rp.)	18,59	26,04	38,10	25,00
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,68	4,99	4,63	4,20
7.	Kemiskinan (%)	13,58	13,32	13,19	11,30 – 10,83
8.	NTP	100,55	102,03	99,35	102,86

Sumber : Rancangan RKPD 2018 Prov. Jateng, 2017, hal III.13.
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Target RPJMD*

Angka inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2012-2016 memiliki tren meningkat kemudian menurun. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada bulan Desember 2016 sebesar 2,36% (*yoy*), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 (2,73%). Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh terjaganya pasokan, ketersediaan dan stabilnya harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat serta minimalnya dampak kebijakan kenaikan tarif listrik. Perkembangan inflasi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

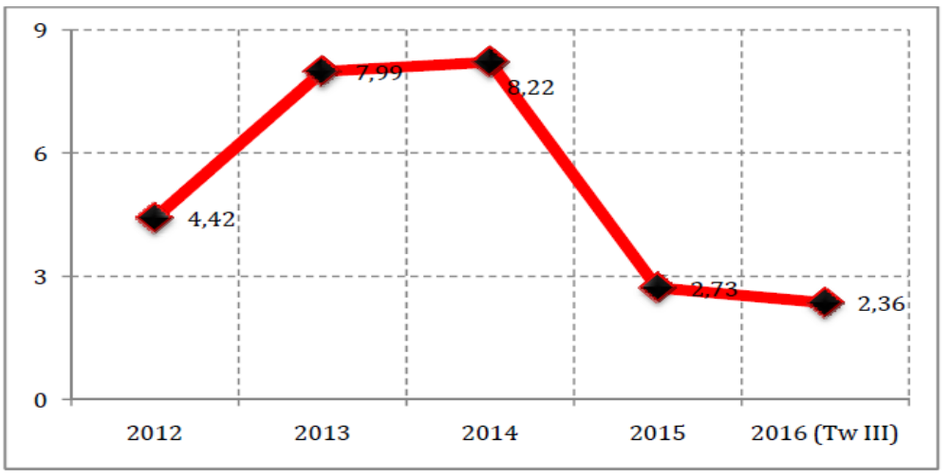

Sumber : RKPD Prov Jateng 2018

Gambar 3.5 Inflasi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016

Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2018 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidak pastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa **tantangan** yang dihadapi Jawa Tengah antara lain:

1. Diversifikasi produk ekspor berbahan baku lokal yang tidak dihasilkan oleh negara-negara maju yang menerapkan kebijakan prateksionisme perdagangan; penggunaan bahan baku lokal juga mengantisipasi ketergantungan impor bahan baku;
2. Peningkatan daya saing prosuk lokal Jawa Tengah, agar mampu menembus pasar ekspor luar negeri dan domestik;
3. Perluasan pasar dan mitra dagang utama produk ekspor luar negeri Jawa Tengah;
4. Penerapan kebijakan investasi untuk mengantisipasi mengalirnya modal asing sebagai dampak penguatan dolar AS;
5. Pengendalian inflasi yang mungkin akan meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga yang dapat berdampak pada permintaan konsumsi dan resiko investasi; serta sebagai antisipasi kenaikan harga pangan akibat naiknya harga komoditas dunia;
6. Perbaikan dan pemerataan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Jawa Tengah antara lain meliputi:

1. Pasar ekspor luar negeri semakin terbuka untuk produk ekspor berbahan baku lokal seperti produk mebel;
2. Permintaan pasar domestik terhadap produk dan komoditas lokal Jawa Tengah yang masih cukup tinggi;
3. Meningkatnya aliran investasi asing, sebagai dampak penguatan dolar AS akibat kebijakan kenaikan suku bunga The Fed;
4. Kenaikan harga kmoditas dunia yang akan berpengaruh terhadap harga kenaikan komoditas pangan Jawa Tengah yang berorientasi pada ekspor seperti produk pertanian (kopi, teh tembakau) atauproduk makanan dan minuman;
5. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran produk.

3.1.4. Perkembangan Kerangka Ekonomi Kabupaten

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK) Tingkat Inflasi dan Pendapatan per kapit. Sebagai salah satu indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Kondisi PDRB di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2012-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2015

Tahun	PRDB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2012	20.269.679,71	8,06	18.219.456,66	5,90
2013	22.219.243,68	9,62	19.256.516,28	5,69
2014	24.632.549,67	10,86	20.261.774,84	5,22
2015	26.883.211,03	9,14	21.284.742,55	5,05

Sumber : BPS, analisa PDRB, 2017

Sementara gambaran besaran sumbangan sektor-sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2012-2016 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4. Terlihat bahwa sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan 3 sektor yang mempunyai kontribusi terebsar dalam PDRB Kabupaten

Karanganyar. Selama 5 tahun terakhir belum terlihat secara jelas adanya perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.5. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2012-2015

No	Sektor Ekonomi	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,53	14,83	14,45	14,83
B	Pertambangan dan Penggalian	1,15	1,13	1,19	1,26
C	Industri Pengolahan	46,38	45,06	45,64	45,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,13	0,13
E	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	6,25	6,25	6,34	6,37
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	11,77	11,65	11,14	11,11
H	Transportasi dan pergudangan	2,45	2,45	2,53	2,50
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,27	3,16	3,30	3,31
J	Informasi dan komunikasi	1,18	1,14	1,10	1,07
K	Jasa Keuangan dan asuransi	3,53	3,48	3,37	3,41
L	Real estate	1,71	1,69	1,72	1,74
Jumlah		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS, Analisa PDRB Kab Karanganyar, 2016

Selain melihat PDRB kondisi ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks harga barang dan tingkat inflasi daerah tersebut. Perubahan harga yang digambarkan oleh indeks harga dan tingkat inflasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, peredaran barang dan nilai mata uang. Angka inflasi yang diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan salah satu indikator makro ekonomi penting yang menggambarkan fluktuasi dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar cukup fluktuatif. Tingkat inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,30% dan menurun di tahun 2014 menjadi 7,38% dan turun lagi pada tahun 2015 menjadi 2,40. Angka di tahun 2015 merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir ini. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.6

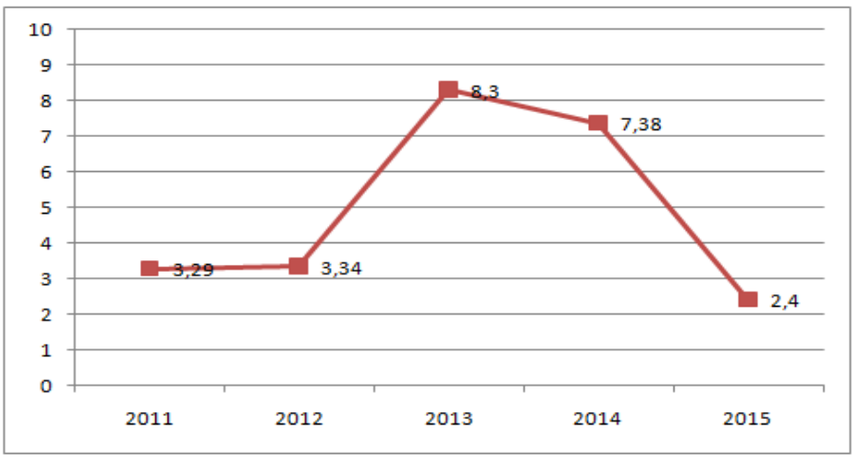

Sumber : BPS, Indikator ekonomi, 2015

Gambar 3.6 Laju Inflasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2015 (%)

3.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan RPJMD, ditujukan untuk "**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari"**, dengan **arah kebijakan** meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan di atas antara lain melalui:

1. Mengembangkan daya saing wilayah berbasis pada potensi unggulan lokal;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UKM serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin;
3. Pengembangan SDM di berbagai sektor pendukung pembangunan dan peningkatan layanan sosial dasar;
4. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, pengembangan diversifikasi pangan dan optimalisasi kapasitas SDM sektor pertanian;
5. Peningkatan pelayanan jaringan listrik dan fasilitasi dukungan pengembangan energi baru terbarukan;
6. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi padat karya;

7. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;
8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional;
9. Pengurangan risiko dampak bencana.

3.3. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi masih kurang optimal, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah.
b. Masih rendahnyakualitas tenaga kerjayang memasuki pasar kerja, baik pendidikan dan keterampilan di sektor industri sehingga mengakibatkan daya saing yang rendah di pasar kerja.
c. Meningkatnya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standarkualitas bagi prduk barang dan jasa termasuk hasil industri dari UMKM dan kerajinan.
d. Belum terpadunya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan .
e. Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung (jalan, jembatan, jaringan irigasi, pemenuhan air baku/ irigasi, sekolah dan sarana kesehatan) yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah secara merata dan pertumbuhan penanaman modal yang berkualitas.
f. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal, promosi potensi unggulan daerah dan pengembangan pariwisata serta pengembangan ”city branding” dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif .

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisi perekonomian baik nasional, provinsi serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2018, dengan merujuk pada capaian indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Tabel 9.1 halaman IX-4) adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23 %;

b. Tingkat Inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 3,6 (±) %.
c. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperkirakan sebesar Rp. 29.991.414,4;
d. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) diperkirakan sebesar Rp. 26.456.680,91.
e. Persentase penduduk miskin diperkirakan adalah 11,64%.
f. Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan adalah 82,7.

3.4. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018 dijelaskan oleh kebijakan pendapatan, belanja dan pembiyaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan.

1) Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui :
   a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, Penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak / Retribusi Daerah;
   b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
   c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
   d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
   e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
   f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
   g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda retribusi;
   h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.

2) Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
3) Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD / Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda;
4) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
5) Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Secara rinci realisasi tahun 2014 - 2017 dan proyeksi pendapatan tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2014 - 2018

No.	URAIAN		Jumlah (Rp. Milyar)				
			2014 (Realisasi)	2015 (Realisasi)	2016 (Realisasi)	2017 (Rencana)	2018 (Rencana)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**		**215,299**	**255,753**	**301,291**	**280,521**	**280,521**
.	a.	Pendapatan Pajak Daerah	86,152	106,487	128,301	111,583	111,583
	b.	Pendapatan Retribusi Daerah	28,718	22,138	25,298	23,075	23,014
	c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,697	7,817	8,555	10,243	10,243
	d.	Lain-lain PAD yang Sah	92,732	119,311	139,137	135,619	135,681
2.	**DANA PERIMBANGAN**		**955,829**	**1.065,938**	**1.390,153**	**1.383,087**	**1.541,011**
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	28,589	27,243	41,236	39,361	39,361
		1) Dana Bagi Hasil Pajak	21,596	26,255	33,065	-	-
		2) Dana bagi hasil Bukan Pajak (SDA)	1,195	0,999	1,287	-	-
		3) Bagi Hasil Cukai	5,797	6,904	6,885	-	-
	b.	Dana Alokasi Umum	870,002	906,447	996,164	996,164	996,164
	c.	Dana Alokasi Khusus	57,239	98,091	352,753	347,562	505,486
3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**445,122**	**546,983**	**320,874**	**291,440**	**291,440**
	a.	Pendapatan Hibah	0,731	6,232	1,638	-	-
	b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 8emerintah Daerah Lainnya	90,677	114,267	114,079	103,533	103,533
	c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	273,624	350,326	108,686	187,907	187,907
	d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	80,089	76,159	95,384	-	-
	e.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	TOTAL		**1.616,250**	**1.868,674**	**2.012,319**	**1.955,049**	**2.112,973**

Sumber : BKD, 2017, diolah

3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia, agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan belanja yang tepat. Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
2) Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanakan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3) Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG);
4) Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
5) Belanja daerah yang alokasikan kepada PD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
6) Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga Prioritas Belanja Daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan / dianggarkan untuk mencapai hal tersebut.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dikelompokkan menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Untuk menjalankan urusan wajib maupun urusan pilihan, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar merumuskan program-program maupun kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018.

Urusan pemerintahan secara garis besar dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan refleksi dari anggaran berbasis kinerja yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja langsung PD, harus dipertanggungjawab kan hasilnya oleh PD tersebut. Belanja Tidak Langsung disediakan oleh PD dan dilaksanakan oleh penerima bantuan, hibah atau PD sendiri, sehingga keberhasilan program / kegiatan sangat bergantung pada kerjasama antara PD dan Penerima bantuan atau hibah.

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2014 - 2018

No	URAIAN		Jumlah (Rp. Milyar)				
			2014 (Realisasi)	2015 (Realisasi)	2016 (Realisasi)	2017 (Rencana)	2018 (Rencana)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**		**951,049**	**1.087,678**	**1.325,415**	**1.450,900**	**1,464,973**
.	a.	Belanja Pegawai	807,862	903,074	995,585	1.068,376	1,068,500
	b.	Belanja Bunga	20,165	-	-	-	-
	c.	Belanja Hibah	89,275	109,717	55,114	68,758	70,000
	d.	Belanja Bantuan Sosial	7,755	9,366	6,568	6,670	
	e.	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	2,000	2,000	12,514	13,466	13,000
	f.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan desa	44,.130	63,420	255,437	288,332	310,973
	g.	Belanja Tak Terduga	5,185	101,470	198,205	0,300	2,500
2.	**BELANJA LANGSUNG**		**336,115**	**521,939**	**760,892**	**596,649**	**648,000**
	a.	Belanja Pegawai	49,601	27,943	17,647	21,102	23,000
	b.	Belanja Barang dan Jasa	138,035	270,704	361,175	367.772	415,000
	c.	Belanja Modal	148,479	223,292	382,070	207,774	285,000
	TOTAL		**1.616,250**	**1.868,674**	**2.012,319**	**2.042,549**	**2.207,973**

Sumber : BKD, 2017, diolah

3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten

Karanganyar dari tahun 2014-2017 sebagaian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk:

1) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2014 - 2018

No.	URAIAN		Jumlah (Rp. Milyar)				
			2014 (Realisasi)	2015 (Realisasi)	2016 (Realisasi)	2017 (Rencana)	2018 (Rencana)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**		**261,878**	**262,855**	**323,682**	**97,500**	**105,000**
.	a.	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	257,517	261,830	314,634	97,500	105,000
	b.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	1,026	0,635		
	c.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		
	d.	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	3,619	-	0,035		
	e.	Penarikan dari asset manajemen unit (AMU) Bank Jateng	0,194	-	0,326		
	f.	Sharing cadangan tujuan Bank Jateng	0,547	-	6,924		
	g.	Sharing Saldo Laba dari Bank Jateng	-	-	1,128		
2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**		**6,991**	**6,500**	**25,899**	**10,000**	**10,000**
	a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	6,741	6,500	24,935	10,000	10,000
	b.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	c.	Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	0,250	0,250	0,906	-	-
	d.	Pemberian Hutang Belanja	-	-	0,058	-	-
	Pembiayaan Netto		**254,887**	**256,355**	**297,784**	**87,500**	**95,000**
	Sisa lebih/ kurang pembiayaan tahun berkenaan		**583,973**	**515,412**	**223,794**	**0**	**0**

Sumber : BKD, 2017, diolah